

KECAMATAN TAMPAHAN KABUPATEN TOBA



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Tahun 2023.

RENJA Kecamatan Tampahan merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi PD yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Kecamatan Tampahan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Tahun 2023, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Tampahan, Agustus 2022

CAMAT TAMPAHAN

Freddy A. Panjaitan, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 197812032005021003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
-----------------------------	----------

DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	15
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	18
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	29
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	29
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	31
3.3 Program dan Kegiatan	32
BAB IV RANCANGAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT	40
4.1 Program dan Kegiatan	40
4.1 Pendanaan Indikatif	42
BAB V PENUTUP	51

DAFTAR TABEL

T-C.29.Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan s/d Tahun 2022	12
T-C.30. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Tampahan.....	18
T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan Tampahan Tahun 2023.....	23
T-C.32. Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023.....	28
T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024.....	35
T-C.33a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Tampahan Tahun 2023.....	43

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Kecamatan adalah merupakan salah satu Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 226, Camat mendapatkan pelimpahan tugas sebagai kewenangan Bupati dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Disamping itu Camat juga melaksanakan tugas pemerintahan umum dan kewenangan dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas lainnya yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan Perda;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan di desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tampahan Tahun 2023 merupakan rencana tahun ketiga dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tampahan 2021-2026. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tampahan Tahun 2023 berdasarkan pada Peraturan Bupati Toba Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2023, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Tampahan untuk pelaksanaan Kegiatan tahun 2023.

Secara umum Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tampahan Tahun 2023 memuat kebijakan dan kegiatan yang merupakan penjabaran dan implementasi serta pemberdayaan aparatur dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan pelaksanaan tugas pelimpahan kewenangan dari Bupati Toba. Uraian ini akan diawali dengan kondisi umum yang secara singkat menguraikan pencapaian kinerja sampai dengan tahun 2022 serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2023. Termasuk isu-isu strategis yang ikut mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan prioritas-prioritas pembangunan tahun 2023 dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada masing-masing prioritas dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba dengan visi "TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR".

RENJA Kecamatan Tampahan mempunyai fungsi pokok sebagai berikut:

1. Menjadi acuan bagi Kecamatan Tampahan yang memuat kebijakan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA yang merupakan bagian dari APBD Kabupaten

Toba karena memuat Program dan Kegiatan Kecamatan Tampahan selama satu tahun;

3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Kecamatan Tampahan sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana APBD Kabupaten Toba.

Kedudukan RENJA Kecamatan Tampahan merupakan bagian penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RENSTRA) Kecamatan Tampahan Tahun 2021-2026 dan Dokumen RENJA Kecamatan Tampahan tahun 2023 ini dilengkapi dengan lampiran- lampiran yang antara lain berisi uraian tentang Program dan Kegiatan beserta indikasi pagu untuk masing- masing Program yang didasarkan atas pagu indikatif.

Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah adalah turunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjadi satu kesatuan atau salah satu bidang sebagai fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawab sebuah unit kerja;
- b. RENSTRA OPD dibuat dengan menggunakan RPJMD sebagai acuan dan harus dilakukan melalui koordinasi antar unit kerja dengan Bappeda guna memastikan bahwa jumlah RENSTRA OPD harus termuat dalam RPJMD;
- c. RENSTRA OPD disusun dengan berbedoman pada tugas pokok dan fungsi oleh OPD sebagai salah satu perangkat daerah;
- d. RENSTRA OPD dilengkapi dengan Matriks Rencana Program dengan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun;
- e. Sebagai turunan RENSTRA OPD untuk Perencanaan Tahunan maka disusunlah RENJA Organisasi Perangkat Daerah dengan matrik kegiatan selama 1 (satu) tahun;
- f. RENJA OPD disusun sesuai dengan Matrik Rencana Program Lima Tahun dengan mengutip sesuai dengan tahun perencanaan;
- g. Selanjutnya RENJA tersebut dipergunakan sebagai acuan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Dengan penjelasan di atas, Rencana Kerja (RENJA) ini memberikan gambaran yang jelas apa yang akan dilaksanakan oleh OPD selama 1 (satu) tahun kemudian dengan program yang mengacu pada RPJM dan bagian dari Renstra sehingga kegiatan berkelanjutan dan lebih terarah untuk mencapai sasaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENJA Kecamatan Tampahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
19. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi,

Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005–2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 – 2026;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Perangkat Daerah Kabupaen Toba Samosir
27. Peraturan Bupati Toba Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (RENJA) KecamatanTampahan Tahun 2023 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tampahan Tahun 2023 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Tampahan Tahun 2023 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023;
3. Tolak ukur untuk menentukan tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan tugas Perangkat Daerah Kecamatan Tampahan yang selanjutnya dievaluasi untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan untuk tahun berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tampahan Tahun 2023 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA PROGRAM DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Program dan Kegiatan
- 4.2 Pendanaan Indikatif

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi. Pada Tahun 2021 Kecamatan Tampahan melaksanakan 15 (lima belas) program

dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Rata-rata tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan Tahun 2021 dapat terealisasi 80%, dengan realisasi anggaran Renstra tahun 2021 sebesar 58% dan ini tergolong rendah, hal ini terjadi karena refocusing anggaran dengan adanya Pandemic COVID-19 yang melanda. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Tampahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga mengalami faktor penghambat yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Dampak pandemic COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020;
2. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
3. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;

Sedangkan faktor pendukung yang mendukung kelancaran di Kecamatan Tampahan, antara lain: yaitu Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan; Adanya Komitmen Bupati dalam peningkatan prasarana wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik; serta Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Pada Tahun 2022 Kecamatan Tampahan melaksanakan 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan perkiraan capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2022 mencapai 100%. Sedangkan, capaian kinerja Kecamatan Tampahan sampai dengan Triwulan II mencapai 50% dengan predikat R (Rendah), hal ini terjadi karena beberapa kegiatan yang belum semuanya terlaksana karena direncanakan pada Triwulan selanjutnya. Dan rata-rata capaian kinerja Renstra Tahun 2022 sebesar 5% dengan predikat R (Rendah). Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel T-C.29** berikut:

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Toba

Nama OPD : Kecamatan Tampahan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) Sub Kegiatan (output)		SATUAN INDIKATOR	Target capaian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan (Renstra) Perangkat Daerah pada Akhir Periode		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan, Sub Kegiatan sampai dengan Tahun 2021		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022						PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2022			
									Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun Berjalan 2022		Tingkat Capaian Realisasi target RENSTRA (%)	
1	2	3		4	5		6		7		8		9=(8/7)*100%			10=(6+8)		11=(10/5)*100%
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Outcome	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	%	100	645.300.212	0	0	100	147.377.553	42,29	19.678.888	42,29	13,35	42,29	19.678.888	0,42	0,03
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Output	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan	37	509.046.127	0	0	7,00	120.954.390	71,43	18.578.446	71,43	15,36	71,43	18.578.446	0,15	0,04
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Output	Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	%	100	136.254.085	0	0	100	26.423.163	13,16	1.100.442	13,16	4,16	13,16	1.100.442	0,13	0,01

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Outcome	Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Desa	100	242.822.261	0	0	6,00	47.614.072	72,00	3.739.888	72,00	7,85	72,00	3.739.888	0,72	0,02
7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	Output	<i>Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan</i>	<i>Kegiatan</i>	100	242.822.261	0	0	6,00	47.614.072	72,00	3.739.888	72,00	7,85	72,00	3.739.888	0,72	0,02
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Outcome	Persen Desa tertib administrasi Pemerintahan Umum	Desa	100	108.109.732	0	0	6,00	21.193.810	25,00	4.800.000	25,00	22,65	25,00	4.800.000	0,25	0,04
7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	Output	<i>Persentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan</i>	<i>Kegiatan</i>	100	108.109.732	0	0	1,00	21.193.810	25,00	4.800.000	25,00	22,65	25,00	4.800.000	0,25	0,04
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Outcome	Persen desa tertib administrasi Pemerintahan Desa	Desa	100	17.513.938	0	0	6,00	14.035.144	75,00	3.522.252	75,00	25,10	75,00	3.522.252	0,75	0,05
7.01.06	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Output	<i>Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi</i>	<i>desa</i>	6	76.323.497	0	0	6,00	14.035.144	75,00	3.522.252	75,00	25,10	75,00	3.522.252	12,50	0,05
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Outcome	Cakupan Kinerja Penunjang Urusan Permerintah Daerah	%	100	10.132.651.494	0	0	89	1.941.171.635	35,76	529.617.135	35,76	27,28	35,76	529.617.135	0,36	0,05

7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Output	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	100	72.014.049	0	0	100	13.373.419	24,17	1.800.000	24,17	13,46	24,17	1.800.000	0,24	0,02
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Output	Cakupan layanan administrasi keuangan	%	100	8.477.796.160	0	0	100	1.600.000.000	25,00	471.693.828	25,00	29,48	25,00	471.693.828	0,25	0,06
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Output	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	%	100	20.500.000	0	0	0	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Output	Cakupan layanan administrasi umum	%	100	488.188.011	0	0	100	93.610.000	37,13	18.292.179	37,13	19,54	37,13	18.292.179	0,37	0,04
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Output	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%	100	105.947.253	0	0	100	63.702.362	11,11	2.950.820	11,11	4,63	11,11	2.950.820	0,11	0,03
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%	100	636.964.730	0	0	100	112.539.000	63,06	19.251.055	63,06	17,11	63,06	19.251.055	0,63	0,03
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Output	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%	100	331.241.291	0	0	85	57.946.854	60,71	15.629.253	60,71	26,97	60,71	15.629.253	0,61	0,05
JUMLAH					100	11.146.397.637	0	0	100	2.171.392.214	50,01	561.358.163	50,01	0,26	50,01	561.358.163	0,50	0,04

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 90 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toba Samosir dinyatakan bahwa Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Tampahan, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Tampahan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas/ Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Toba;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Sosial Kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Kecamatan Tampahan senantiasa berbenah diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berupaya agar keberadaan OPD ini dapat bermanfaat bagi masyarakat melalui pengkoordinasian dengan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten dalam memberikan pelayanan guna memenuhi kebutuhan melalui kegiatannya. Melaksanakan pembinaan kepada aparatur desa agar semakin lebih profesional dan tanggap akan prasaran.

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Tampahan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas oknum lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan oknum14kunci keberhasilan antara lain:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan :

- Visi dan misi organisasi yang jelas;
- Titik tolak Kinerja yang jelas dengan adanya SDM Kecamatan Tampahan;
- Perjanjian/penandatanganan fakta Integritas antara Bupati Toba dengan Camat dalam pelaksanaan target kinerja;
- Adanya alokasi anggaran bagi kecamatan;
- Kewenangan koordnansi di tingkat kecamatan;
- Tersedianya sarana dan prasarana;
- Adanya stakeholder, beberapa perusahaan di Kecamatan Tampahan.

Kelemahan :

- Kreativitas dan Inovasi SDM yang belum memadai;
- Komitmen dan tekad desa belum jelas dalam memberdayakan masyarakat;
- Cakupan kerja Pemdes seolah-olah kegiatan Dana Desa dan pelayanan dokumen pendudukan;
- Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi organisasi;
- Belum optimalnya pendanaan kebijakan dan perencanaan;
- Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan dengan tingkat Kabupaten, kecuali Kecamatan dan Desa.

2. Lingkungan Eksternal

Peluang :

- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan 15sosial dan akuntabilitas pemerintahan;
- Komitmen dan kebijakan Bupati untuk memberdayakan masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah dan peningkatan pelayanan public;
- Adanya sumber-sumber potensial dari pihak ketiga dalam pemberdayaan masyarakat;
- Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kecamatan;
- Perlunya penegakan Hukum yang jelas untuk menjamin keamanan dan ketertiban;

- Peluang Investasi aman;
- Peluang Destinasi Pariwisata Kecamatan Tampahan
- Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang beraneka ragam dengan mengandalkan Budaya Batak berupa Dalihan Natolu termasuk para perantau dalam upaya marsipature hutanabe;
- Angkatan kerja yang cukup;
- Penerapan Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa;
- Gerakan tarhilala.
-

Tantangan :

- Tuntutan masyarakat yang semakin beragam terlalu berharap kepada pihak lain untuk memperbaiki kehidupan;
- Prasarana wilayah yang masih rendah dan kurang memadai;
- Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Pemerintahan;
- Kebijakan instansi teknis bagi masyarakat mendukung pemberdayaan masyarakat menuju keluar dari pandemic Covid 19;
- Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat.
- Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

Sehubungan dengan tersedianya Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Satuan Kerja Kantor Camat Tampahan dibidang Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah, maka analisa keberhasilan kinerja Program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam **Tabel T-C.30.** berikut :

Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tampahan

KABUPATEN TOBA

No	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SPM/Standart Nasional	IK K	TARGET RENSTRA OPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase peningkatan tata kelola pemerintahan Kecamatan Tampahan			100	100	100	100	100	44,93	100	100	
2	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana publik			100	100	100	100	100	25	100	100	
3	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang terealisasi			100	100	100	100	100	50	100	100	
4	Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Umum			100	100	100	100	100	33	100	100	
5	Persentase Desa melaksanakan tertib administrasi			100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase layanan administrasi yang tertangani			100	100	100	100	100	31	100	100	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada di Kecamatan Tampahan dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tugas dan fungsi Pemerintahan, Perekonomian, Kesra, dan Pelayanan Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Pelayanan Publik yang disebabkan:

- a. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan;

- b. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Tampahan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1. Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

2. Pembinaan Perangkat, memiliki permasalahan:
 - a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
 - b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a) Perlu pelatihan/pembinaan perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat Pemerintah Desa;

- b) Pengalokasian Anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk Hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Malang dan praktisi hukum.

b. Bidang Perekonomian, Kesra, dan Pelayanan Umum

- 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2. Data Masyarakat miskin yang belum valid;
- 3. Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam Karang Taruna di masing-masing wilayah;
- 4. Masih banyaknya pengajuan proposal baik di bidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan peran institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan kesehatan oleh Dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa dan juga Lurah untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Terus dilakukan validasi data penduduk miskin mulai tingkat desa;
- 4) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan

persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;

- 5) Telah diupayakan verifikasi dan update data terkait keluarga miskin supaya data lebih valid.

c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 1) Minimnya sosialisasi dari stakeholder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 2) Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah
- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat Desa untuk menjaga kebersihan lingkungan;

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Berupaya untuk memfasilitasi terla ksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stakeholder atau Dinas Terkait;
- 2) Mengenai redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Toba, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Tampahan tidak ada permasalahan;
- 3) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta Karang Taruna yang ada di wilayah desa guna menumbuh kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda;
- 4) Mengadakan kegiatan gotong royong dengan melibatkan masyarakat baik di Desa.

d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan kebersihan

lingkungan adalah tanggungjawab bersama;

- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadapantisipasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan para pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan melakukan koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit operasional penanggulangan bencana dan pembentukan Satuan Tugas dan Linmas Desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan para pelaku usaha

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebelum menetapkan RENJA Kecamatan Tampahan Tahun 2023 terlebih dahulu dilakukan Review Terhadap Rancangan Awal RKPD yaitu dengan membuat perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Pada Rancangan awal RKPD Kecamatan Tampahan, Program Kecamatan Tampahan ada sebanyak 5 (Lima) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan, dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan **Tabel T-C.31**.

Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tampahan Tahun 2023 Kabupaten Toba

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tampahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100%	154.223.868	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Tampahan	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	100%	154.223.868	
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Persentase Jumlah Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	100%	126.479.547	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan		Persentase Jumlah Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan	100%	126.479.547	
Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	126.479.547	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan perangkat Daerah Instansi Vertikal Terkait		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 Laporan	126.479.547	
Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	100%	27.744.321	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik	100%	27.744.321	
Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	38 Unit	27.744.321	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	38 Unit	27.744.321	
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tampahan	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	48.210.213	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Tampahan	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	48.210.213	

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan	100%	48.210.213	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan	100%	48.210.213	
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.150.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan	3.150.000	
Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	5 Laporan	45.060.213	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	5 Laporan	45.060.213	
Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tampahan	Persentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa	100%	21.405.748	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Tampahan	Persentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa	100%	21.405.748	
Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	21.405.748	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	21.405.748	
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah dokumen forkopimca yang difasilitasi	4 dokumen	21.405.748	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah dokumen forkopimca yang difasilitasi	4 dokumen	21.405.748	
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tampahan	Persentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	100%	15.302.000	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Tampahan	Persentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	100%	15.302.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	6 Desa	15.302.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	6 Desa	15.302.000	

Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 dokumen	1.515.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 dokumen	1.515.000	
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 laporan	13.787.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	6 laporan	13.787.000	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Tampahan	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.967.204.959	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Kecamatan Tampahan	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.967.204.959	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	13.842.090	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100%	13.842.090	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.214.071	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	9.214.071	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.628.019	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	4.628.019	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan	100%	1.648.000.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi keuangan	100%	1.648.000.000	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.648.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	20 Orang/bulan	1.648.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100%	6.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi kepegawaian	100%	6.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25 Paket	6.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	25 Paket	6.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum	100%	95.511.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan layanan administrasi umum	100%	95.511.100	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	14.140.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4 paket	14.140.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	4.500.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	4.500.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	6.060.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	4 paket	6.060.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 paket	1.010.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	4 paket	1.010.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10.100.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	10.100.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	59.701.100	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 laporan	59.701.100	
Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100%	19.305.199	Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100%	19.305.199	
Pengadaan Mebel		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	4.305.199	Pengadaan Mebel		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	3 unit	4.305.199	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	2 unit	15.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	2 unit	15.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100%	120.805.031	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	100%	120.805.031	
Penyediaan Jasa surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	399.300	Penyediaan Jasa surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	399.300	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	8.976.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 Laporan	8.976.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	111.429.731	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	2 Laporan	111.429.731	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	63.741.539	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Barang Milik Daerah yang Terpelihara	100%	63.741.539	
Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	51.509.700	Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 unit	51.509.700	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	6.195.200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	6.195.200	
Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	6.036.639	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	6.036.639	
TOTAL RANCANGAN AWAL RKPD				2.206.346.788	TOTAL HASIL ANALIS KEBUTUHAN				2.206.346.788	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pelaksanaan Pembangunan terlebih dahulu dilengkapi dengan data usulan dan rencana Pembangunan yang tentu menjadi skala prioritas dan realistis dilaksanakan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kecamatan Tampahan dalam merancang program dan kegiatan pembangunan satu tahun kedepan pasti mempertimbangkan proses pembangunan yang sedang berlangsung, hasil Musrenbang Desa dan Kecamatan dimana ditampung seluruh proses aspirasi masyarakat, hasil reses DPRD maupun para pemangku kepentingan. Selanjutnya disusun dalam suatu *blue print* atau Data Pembangunan Kecamatan Tampahan untuk dirumuskan dan dibahas dalam forum musyawarah. Hasil forum musyawarah dimaksud menjadi Dokumen Pembangunan Kecamatan Tampahan yang diusulkan dan dibawa dalam Musrenbang Kabupaten untuk dapat ditampung menjadi Program dan kegiatan Pembangunan yang ditampung baik dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun dana bantuan dari masyarakat/stake holder.

Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Toba

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
NIHIL					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepentingan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan/atau instansi pemerintah lainnya di

wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sociocultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Secara filosofis, kecamatan yang dipimpin oleh Camat perlu diperkuat dari aspek sarana prasarana, sistem administrasi, keuangan dan kewenangan bidang pemerintahan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayahan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kabupaten yang dipimpin oleh Bupati. Sehubungan dengan itu, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan dari 2 (dua) sumber yakni : *pertama*, bidang kewenangan dalam lingkup tugas umum pemerintahan; dan *kedua*, kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam penyusunan RENJA 2023 Kecamatan Tampahan, senantiasa menelaah terhadap Kebijakan Nasional sehingga pada gilirannya pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tampahan senantiasa berpedoman pada kebijakan dan prioritas pembangunan yang dikaitkan tupoksi Kecamatan Tampahan, yaitu:

a. Bidang Pemerintahan

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se Kecamatan. Aparatur Pemerintah Desa dituntut untuk lebih meningkatkan SDM dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan PP No.72 Tahun 2005.

b. Bidang Pembangunan

- 1) Perencanaan Pembangunan Daerah. Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan Tampahan dihasilkan melalui Musrenbang Kecamatan yang merupakan usulan-usulan prioritas pembangunan dari masyarakat didesa, sehingga pada gilirannya diperoleh dokumen Perencanaan Pembangunan Kecamatan Tampahan.
- 2) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam membangun Desa, sebagai cermin pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan di desa.
- 3) Pembangunan Infrastruktur Desa. Dalam rangka percepatan peningkatan perekonomian desa perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur desa yang memadai agar hasil bumi dari desa dapat terangkut ke lokasi pemasaran
- 4) Peningkatan Peran Serta Gender dalam Pembangunan, khususnya dalam pembinaan keluarga.
- 5) Pengembangan data/informasi dan statistik daerah, sebagai upaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di desa melalui profil dan Kecamatan Tampahan.

c. Bidang Kemasyarakatan

- 1) Pembinaan Organisasi Kepemudaan, yang menitikberatkan pembinaan organisasi kepemudaan sebagai generasi penerus bangsa untuk menciptakan pemuda yang sehat, solid, mandiri dan kreatif
- 2) Kerjasama informasi dan media massa, yang bertujuan menyebarluaskan informasi oleh pemerintah Kecamatan Tampahan kepada masyarakat yang sifatnya penyuluhan dan himbauan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Tampahan terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 terutama misi kedua yaitu:

“Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul dan Andal”

Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Tampahan adalah:

“Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan pemerintahan di Kecamatan”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Tampahan dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2021-2026 kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2023 antara lain: **“Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan publik di Kecamatan”**

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Tampahan, maka pada Tahun 2022 Kecamatan Tampahan melaksanakan sebanyak 5 (Lima) Program, 11 (Sebelas) Kegiatan, dan 28 (Dua Puluh Delapan) Sub Kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. *Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*

- 1) Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

2. *Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum*

- 1) Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. *Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*

- 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa

- 2) Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan

III. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*

- 1) Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. *Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*

- 1) Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- 2) Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
- 6) Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

3. *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*

- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

4. *Administrasi Umum Perangkat Daerah*

- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. *Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

- 1) Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk mengetahui secara rinci tentang Rencana Program dan Kegiatan dan Pendanaan indikatif Tahun Anggaran 2023 disajikan dalam tabel **T.C 33** sebagai berikut:

T-C.33.Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024

Kecamatan Tampahan

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN INDIKAT OR	RENCANA TAHUN 2023					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	SUMBER USULAN		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan	%	Kecamatan Tampahan	100	154.223.868	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Renstra 2021-2026		100	153.749.185
7.01.02. 2.01	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Persentase Jumlah Kegiatan Pemerintahan ditingkat Kecamatan</i>	%		100	126.479.547				100	126.477.889
7.01.02. 2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	laporan		7	126.479.547				7	126.477.889
7.01.02. 2.03	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Sarana dan prasarana publik dalam kondisi baik</i>	%		100	27.744.321				100	27.271.296
7.01.02. 2.03.02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang terpelihara dengn Melibatkan Pihak Swasta	unit		38	27.744.321				38	27.271.296
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	Kecamatan Tampahan	100	48.210.213	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Renstra 2021-2026		100	48.692.315

7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan	%		100	48.210.213				100	48.692.315
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan		5	3.150.000				5	3.181.500
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	laporan		5	45.060.213				5	45.510.815
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Desa tertib administrasi pemerintahan Desa	%	Kecamatan Tampahan	100	21.405.748	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Renstra 2021-2026		6	21.619.806
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	%		100	21.405.748				100	21.619.806
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	dokumen		4	21.405.748				4	21.619.806
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaksanakan tertib administrasi	%	Kecamatan Tampahan	100	15.302.000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Renstra 2021-2026		100	15.455.020
7.01.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi	desa		6	15.302.000				6	15.455.020

	Pemerintahan Desa										
7.01.06. 2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	dokumen		12	1.515.000				12	1.530.150
7.01.06. 2.01.17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	laporan		6	13.787.000				6	13.924.870
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	%	Kecamatan Tampahan	100	1.967.204.959	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Renstra 2021-2026		100	2.005.783.072
7.01.01. 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%		100	13.842.090				100	13.980.510
7.01.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen		2	9.214.071				10	4.205.711
7.01.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan		5	4.628.019				10	4.674.299
7.01.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi keuangan	%		100	1.648.000.000				100	1.664.480.000
7.01.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		20	1.648.000.000				20	1.664.480.000

7.01.01. 2.025	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi kepegawaian	%		100	6.000.000				0	-
7.01.01. 2.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Paket		25	6.000.000				0	-
7.01.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	%		100	95.511.100				100	91.268.100
7.01.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket		1	14.140.000				4	14.281.400
7.01.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket		1	4.500.000				4	4.545.000
7.01.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Paket		2	6.060.000				4	6.120.600
7.01.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	dokumen		2	1.010.000				2	1.020.100
7.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan		1	10.100.000				12	10.201.000
7.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		2	59.701.100				270	55.100.000
7.01.01. 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	%		100	19.305.199				100	49.735.719
7.01.01. 2.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Unit		-	-				1	35.000.000

7.01.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	Unit		3	4.305.199				3	4.735.719
7.01.01. 2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Unit		2	15.000.000				2	10.000.000
7.01.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Kinerja Aparatur	%		100	120.805.031				100	121.939.788
7.01.01. 2.08.01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	399.300				1	330.000
7.01.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan		4	8.976.000				4	9.065.760
7.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan		2	111.429.731				4	112.544.028
7.01.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara	%		100	63.741.539				100	64.378.955
7.01.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit		4	51.509.700				5	52.024.797
7.01.01. 2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Unit		4	6.195.200				18	6.257.152
7.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit		2	6.036.639				2	6.097.006

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Renstra Kecamatan Tampahan, maka disusun program kerja Kecamatan Tampahan dengan memperhatikan visi misi Kabupaten Toba yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, dan program kegiatan yang menjadi skala prioritas. Program dan Kegiatan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Tampahan Tahun 2023 terdiri dari sebanyak 5 (Lima) Program, 12 (Dua Belas) Kegiatan, dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub Kegiatan, yakni:

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

- 1) *Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait*

2. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

- 1) *Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta*

II. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- 1) *Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa*
- 2) *Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan*

III. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- 1) *Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*

IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) *Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa*
- 2) *Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya*

V. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*
- 2) *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) *Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya*

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*
- 2) *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*
- 3) *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan*
- 4) *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*
- 5) *Fasilitas Kunjungan Tamu*
- 6) *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) *Pengadaan Mebel*
- 2) *Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) *Penyediaan Jasa Surat Menyurat*

2) *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*

3) *Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*

7. *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*

1) *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*

2) *Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya*

3) *Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*

4.2 PENDANAAN INDIKATIF

Untuk pendanaan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tampahan pada Tahun 2023 adalah berasal dari Dana Alokasi Transfer Umum (DAU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba.

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tampahan Tahun 2023 dan kegiatan disajikan dalam tabel **T-C.33 A** yaitu sebagai berikut:

T.C- 33 A. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN KECAMATAN TAMPAHAN TAHUN 2023

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	PRIORI TAS DAER AH	SASARAN DAERAH	LOK ASI	INDIKATOR KINERJA						PAGU INDIKATIF TAHUN 2023	PRAKIRA AN MAJU TAHUN 2024	SUM BER USUL AN	SUMBE R DANA	OPD PENAN GGUN GJAW AB	CA TAT AN PE NTI NG	JEN IS KE GIA TA N	
					HASIL PROGRAM		KELUARAN KEGIATAN/ SUB KEGIATAN		HASIL KEGIATAN/ SUB KEGIATAN									
					TOLOK UKUR	TAR GET	TOLOK UKUR	TAR GET	TOLOK UKUR	TAR GET								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
7	URUSAN KEWILAYAHA N																	
7.01	KECAMATAN		<i>Meningkat nya kinerja ASN yang profesion al dalam pelayanan publik.</i>	Kec. Tamp ahan							2.206.346. 788	2.245.299. 398						
7.01.02	PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAHA N DAN PELAYANAN PUBLIK			Kec. Tamp ahan	Cakupan penyelengg araan pelayanan publik di Kecamatan	100%					154.223.86 8	153.749.18 5	Rens tra 2021- 2026	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Tampa han			
7.01.02 .2.01	<i>Koordinasi Penyelenggara an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>						<i>Kegiatan Pemerint ahan di Tingkat Kecamat an</i>	<i>7 Kegia tan</i>			126.479.54 7	126.477.88 9						

7.01.02 .2.01.0 1	Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait								Jumlah Laporan Koordinas i/Siner gi Perencana an dan Pelaksana an Kegiatan Pemerinta han dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7 lapor an	126.479.54 7	126.477.88 9						
7.01.02 .2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum						Sarana dan prasaran a publik dalam kondisi baik	100%				27.744.321	27.271.296					
7.01.02 .2.03.0 2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta								Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatk an Pihak Swasta	38 unit	27.744.321	27.271.296						
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Kec. Tamp ahan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangun an	6 Desa						48.210.213	48.692.315	Rens tra 2021- 2026	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Tampa han		

7.01.03 .2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						Kegiatan Pemberdayaan Desa yang dilakukan	6 Kegiatan			48.210.213	48.692.315					
7.01.03 .2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah perencanaan pembangunan di desa								Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga	3.150.000	3.181.500					
7.01.03 .2.01.03	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan								Pembinaan Organisasi Desa	5 Laporan	45.060.213	45.510.815					
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan dukungan dalam kegiatan pemerintahan	6 Desa			21.405.748	21.619.806	Rens tra 2021-2026	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Tampilan		

7.01.05 .2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>						<i>Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan</i>	100%			21.405.748	21.619.806					
7.01.05 .2.01.0 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan								Pembayaran honorarium forkopimca	4 dokumen	21.405.748	21.619.806					
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Kec. Tampahan	Pelaksanaan Integrasi, Sinerji, dan Terobosan dalam pemerintahan di Kecamatan	6 Desa					15.302.000	15.455.020	Rentra 2021-2026	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Tampahan		
7.01.06	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>						<i>Jumlah Desa dan Kelurahan yang dilakukan fasilitasi</i>	6 desa			15.302.000	15.455.020					
7.01.06 .2.01.0 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa								Jumlah Perdes dan Perkades yang dievaluasi	12 dokumen	1.515.000	1.530.150					
7.01.06 .2.01.1 7	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya								Jumlah Desa yang difasilitasi	6 Laporan	13.787.000	13.924.870					

									i Kecamat an								
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA			Kec. Tamp ahan	Penunjang Kinerja Perangkat Daerah	100%					1.967.204. 959	2.005.783. 072	Rens tra 2021- 2026	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Tampa han		
7.01.01 .2.01	<i>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>						<i>Persenta se Capaian Kinerja Perangk at Derah</i>	100%			13.842.090	13.980.510					
7.01.01 .2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah	2 doku men	9.214.071	4.205.711					
7.01.01 .2.01.0 6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								Capaian dan Realisasi Kinerja	5 lapor an	4.628.019	4.674.299					
7.01.01 .2.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>						<i>Cakupan layanan administ rasi keuanga n</i>	100%			1.648.000. 000	1.664.480. 000					
7.01.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Gaji dan Tunjanga n ASN	20 orang /bulan	1.648.000. 000	1.664.480. 000					
7.01.01 .2.025	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>						<i>Cakupan layanan administ rasi kepegaw aian</i>	1 Paket			6.000.000	-					
7.01.01 .2.05.0 2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya								Pengada an Pakaian Dinas	1 Paket	6.000.000	-					

7.01.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Cakupan layanan administrasi umum	100%			95.511.100	91.268.100					
7.01.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket	14.140.000	14.281.400					
7.01.01 .2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								Peralatan rumah tangga	1 paket	4.500.000	4.545.000					
7.01.01 .2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								Cetakan dan penggandaan	2 paket	6.060.000	6.120.600					
7.01.01 .2.06.0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 dokumen	1.010.000	1.020.100					
7.01.01 .2.06.0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu								Kunjungan Tamu	1 laporan	10.100.000	10.201.000					
7.01.01 .2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								Rapat Koordinasi dan Konsultasi	2 Laporan	59.701.100	55.100.000					
7.01.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Cakupan peralatan dan perlengkapan pendukung kinerja aparatur	100%			19.305.199	49.735.719					

7.01.01 .2.07.0 1	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan								Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	-	-	35.000.000					
7.01.01 .2.07.0 5	Pengadaan Mebel								Mebel	3 Unit	4.305.199	4.735.719					
7.01.01 .2.07.0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								Peralatan dan mesin lainnya	2 Unit	15.000.000	10.000.000					
7.01.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Jasa Penunjang Kinerja Aparatur			120.805.031	121.939.788				
7.01.01 .2.08.0 1	Penyediaan Jasa surat Menyurat								Jasa Surat Menyurat	1 laporan	399.300	330.000					
7.01.01 .2.08.0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4 laporan	8.976.000	9.065.760					
7.01.01 .2.08.0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 laporan	111.429.731	112.544.028					
7.01.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								Barang Milik Daerah yang Terpelihara			63.741.539	64.378.955				

7.01.01 .2.09.0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								Jasa Pemeliha raan dan Pajak Kendara an Dinas	4 Unit	51.509.700	52.024.797					
7.01.01 .2.09.0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya								Peralatan dan Mesin Kantor	4 Unit	6.195.200	6.257.152					
7.01.01 .2.09.0 9	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								Gedung Kantor dan Banguna n Lainnya	2 Unit	6.036.639	6.097.006					

BAB V

P E N U T U P

RENJA Kecamatan Tampahan Kabupaten Toba Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif PD sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan RENJA Tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk RENJA Perubahan dengan tetapberpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya RENJA Tahun 2023, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tampahan, Agustus 2022

CAMAT TAMPAHAN

Freddy A. Panjaitan, S.Sos, MM
Pembina
NIP.19781203 2005 1003

LAMPIRAN